

**PEREMPUAN ACEH AWARD: PASANG SURUT GERAKAN  
PEREMPUAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN**

**Rosnida Sari<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

*This paper looks at the Aceh women's movement in helping to respect women's work in the grassroots community. This effort was carried out to give recognition and appreciation for women who have dedicated themselves to upholding women's human rights in Aceh, because there are still many people who do not yet know the humanitarian work they have done. The women who were nominated were those who worked since the time of the conflict until now. This voluntary work they do without financial support on a regular basis from the government, although some of them are listed as volunteers in their respective city P2TP2A. The types of cases they handle vary, from domestic violence cases to women's empowerment and society. This research was conducted in the Banda Aceh, Bener Meriah and Central Aceh regions. The research method for this study was in-depth interviews of winners, nominees and implementers of activities shaded by the Ureung Inong Aceh Shura Hall. The results of this study indicate that there are ups and downs in the implementation of this activity. Some of the obstacles that hindered him were the unavailability of funds, weak government commitment and lack of coordination of women's institutions in Aceh in the success of this activity.*

**Keywords:** *Aceh Women Award, Aceh Women's Movement, Empowerment*

**ABSTRAK**

Tulisan ini melihat tentang gerakan perempuan Aceh dalam membantu menghargai kerja-kerja perempuan di komunitas akar rumput. Usaha ini dilakukan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan bagi perempuan yang telah mendedikasikan dirinya untuk penegakkan hak asasi perempuan di Aceh, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan. Perempuan-perempuan yang dijadikan nominator adalah mereka yang bekerja sejak masa konflik hingga saat ini. Pekerjaan yang bersifat kerelawanan ini mereka lakukan tanpa support finansial secara rutin dari pemerintah, meski beberapa dari mereka tercatat sebagai relawan di P2TP2A kota mereka masing-masing. Jenis kasus yang mereka tangani bermacam-macam, dari kasus KDRT hingga pemberdayaan

---

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

perempuan dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Banda Aceh, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Metode penelitian untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam para pemenang, nominator dan pelaksana kegiatan yang dinaungi oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pasang surut dalam pelaksanaan kegiatan ini. Beberapa kendala yang menghambatnya adalah ketidaktersediaan dana, komitmen pemerintah yang lemah dan kurangnya koordinasi lembaga-lembaga perempuan di Aceh dalam menyelesaikan kegiatan ini.

**Kata kunci:** Perempuan Aceh *Award*, Gerakan Perempuan Aceh, Pemberdayaan

## **A. Pendahuluan**

Tulisan ini mencoba melihat tentang gerakan perempuan di Aceh yang mencoba mengangkat harkat dan martabat perempuan-perempuan akar rumput yang telah berbuat banyak untuk masyarakat, tetapi miskin penghargaan. Kerja-kerja perempuan selama ini sering hanya dilihat di lingkungan domestik, sehingga kerja-kerja mereka yang lain, yang berkaitan dengan isu-isu publik, terkadang sering diremehkan. Akibatnya, kerja-kerja mulia yang telah dilakukan oleh mereka ini sering tidak dianggap.

Gerakan Perempuan Aceh telah melakukan kerja-kerja yang tidak sedikit. Di antara kegiatan tersebut adalah pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Namun ditulisan ini, tema yang akan diangkat adalah usaha membangkitkan kesadaran masyarakat lewat pemberian penghargaan bagi perempuan-perempuan di pedesaan atas pengabdian mereka pada kemanusiaan.

Aceh telah lama dikenal sebagai daerah yang mempunyai banyak pejuang perempuan. Selain Cut Nyak Dhien, Cut Meutia dan Malahayati yang sudah begitu mendunia namanya, Aceh masih mempunyai banyak pahlawan perempuan. Misalnya Nurasyiah yang merupakan ratu pertama di Aceh, Ratu Safiatuddin, Putri Lindung Bulan, Tengku Fakinah dan Pocut Meuligo. Sari dalam *'Women's Participation in Local Politics in*

*Aceh'* mencatat bahwa terdapat 18 Perempuan berpengaruh dalam sejarah Aceh yang tercatat dari tahun 1353-1920.<sup>2</sup> Dengan begitu banyaknya perempuan berkapasitas yang tercatat dalam sejarah Aceh, tidak heran jika hingga saat ini juga semangat para pejuang itu mengalir dalam darah perempuan Aceh. Hal ini ditambah lagi dengan konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh sehingga membentuk karakter perempuan Aceh menjadi begitu kuat.

Banyak sejarawan yang berkata bahwa terdapat empat hal besar yang terjadi di Aceh yang berhubungan dengan konflik. Yang pertama, ketika masa Belanda ada di Aceh (1873-1904) dan masa pendudukan Jepang (1942-1947). Ketika itu terdapat dua grup yang memperdebatkan apakah Aceh harus merdeka atau menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Grup pertama adalah para alim ulama dan para *uleebalang* (bangsawan). Sulaiman dalam Reid<sup>3</sup> menyatakan bahwa pada masa penjajahan Jepang, ada dua grup yang terlibat perang sipil atau yang lebih dikenal dengan nama Perang Cumbok yang terjadi di Lameulo dari tanggal 22 Desember 1945 dan berakhir pada 13 January 1946. Ini merupakan perang sipil terbesar di Aceh yang membunuh 1500 orang.<sup>4</sup>

Periode kedua adalah ketika Hasan Tiro melihat ketidakadilan yang diberikan Jakarta kepada masyarakat Aceh. Pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia dengan nama Aceh Merdeka. Ini merupakan akar dari gerakan Aceh Merdeka. Hasan Tiro sangat didukung oleh pimpinan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Daud Bereueh. Sukma dalam '*Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution*' menyatakan

---

<sup>2</sup>Rosnida Sari, *Women's Participation in Local Politics in Aceh (A Case Study)*, Unpublished Thesis, (South Australia: Flinders University, 2013), hlm. 55-56.

<sup>3</sup>Anthony Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006), hlm. 127.

<sup>4</sup>Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 4.

bahwa dengan dukungan yang diberikan oleh Daud Bereueh, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dengan berkata “*Kami, Masyarakat Aceh, Sumatera....memproklamasikan bahwa kami bebas dan merdeka dari semua kontrol politik dari rezim asing Jakarta dan kroni-kroninya di pulau Jawa*”. Gerakan ini kemudian diserang oleh pemerintah Indonesia yang mengakibatkan banyak orang yang tewas dan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka menjadi pencari suaka ke luar negeri.

Konflik ketiga terjadi pada tahun 1989. Konflik tersebut dipicu oleh aparat militer desertir dan figur lokal Aceh setelah pemerintah Indonesia dengan aksi represifnya membuat Golkar menang di pemilu 1987. Generasi kedua GAM yang tergabung di figur lokal Aceh mendapatkan pelatihan militernya di Libya dan mereka mempunyai keterampilan dan kekuatan yang lebih.<sup>5</sup> Untuk menghentikan gerakan ini, pemerintah Indonesia menurunkan tentara ke Aceh dan menciptakan apa yang disebut dengan Operasi Jaring Merah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Daerah Operasi Militer (DOM).<sup>6</sup> Ini merupakan saat yang paling menyedihkan bagi masyarakat Aceh karena banyak orang yang terbunuh. Tekanan yang dilakukan oleh tentara membuat konflik ini terhenti sementara.

Konflik keempat terjadi pada masa reformasi 1998. Penyebab konflik ini adalah karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul lagi. Mereka merupakan generasi ketiga GAM. Mereka yang pergi ke Malaysia dan negara-negara lain kembali lagi ke Aceh dan mulai membujuk orang-orang untuk ikut terlibat digerakan ini. Reformasi menyebabkan gerakan generasi ketiga ini menjadi mungkin untuk menceritakan tentang kekejaman dan frustasinya orang-orang atas ketidakadilan dari

---

<sup>5</sup>Saiful Mahdi, *Perempuan dari Sebuah Negeri Bernama Aceh*, dalam *Perempuan dan Proses Perdamaian di Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Institute, 2009), hlm. 8.

<sup>6</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hlm. 206.

pemerintah Indonesia. Banyak orang yang mendengarkan mereka dan anak-anak muda menjadi bagian dari sayap militer gerakan ini.<sup>7</sup>

Banyak sekali tulisan yang menuliskan tentang proses perdamaian di Aceh. Namun sedikit sekali yang menuliskan tentang peran perempuan sebagai agen perdamaian. Padahal, dalam salah satu perbincangan dengan seorang perempuan aktivis dikatakannya bahwa ketika konflik terjadi, perempuan menjadi salah satu aktor yang menghentikan peperangan untuk sementara. Ketika terjadi tembak-tembakan antara GAM dan TNI pada tahun 1990an, para ibu-ibu sedang menanam padi di sawah. Ibu-ibu tersebut berbagi peran untuk mendatangi mereka yang sedang bertikai. Mereka berkata "*hentikan dulu perang kalian. Kami sedang menanam padi. Kalau kami tidak nanam, nanti anak-anak kami tidak bisa makan*".<sup>8</sup> Maka peperanganpun berhenti untuk saat itu.

Cerita yang lain datang dari seorang perempuan muda. Ketika konflik dia masih SMU. Di sebelah sekolahnya terdapat pos TNI. Ketika sedang belajar di dalam kelas, ia kerap mendengar erangan dan rintihan pemuda yang ditangkap karena dianggap GAM ataupun simpatisan GAM. Akibatnya, dia dan teman-temannya tidak konsentrasi belajar. Ia kemudian mendatangi pos TNI tersebut dan berkata kepada petugas yang dia kenal di sana untuk tidak menyiksa tahanan ketika jam belajar mengajar, karena mengganggu konsentrasi mereka. Keesokan harinya, ia tidak lagi mendengar suara-suara erangan dan jeritan laki-laki dari pos TNI itu.<sup>9</sup> Besar kemungkinan penyiksaan dilakukan pada sore atau malam hari, ketika anak-anak sekolah telah pulang.

Kerja-kerja perempuan yang seperti cerita di atas jarang ditulis dan dihargai. Oleh karenanya gerakan perempuan Aceh mencoba menginisiasi

---

<sup>7</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh...*, hlm. 8.

<sup>8</sup>Wawancara pada tanggal 24 Juni 2011.

<sup>9</sup>Perbincangan dengan seorang staff perempuan organisasi sosial pada tanggal 19 Agustus 2016.

kegiatan untuk memberikan penghargaan bagi perempuan-perempuan hebat yang ada di Aceh, sehingga kerja-kerja mereka bisa menginspirasi perempuan-perempuan lain.

Melihat bahwa banyak kegiatan perempuan yang begitu produktif dan menginspirasi, maka penulis mencoba untuk menuliskan pengalaman perempuan lewat tulisan ini yang berjudul "Perempuan Aceh Award: Pasang Surut Gerakan Perempuan Aceh dalam Pemberdayaan Perempuan".

## **B. Gerakan Perempuan: Dulu dan Kini**

Momen yang paling diingat ketika berbicara tentang gerakan perempuan adalah Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres ini diadakan dua bulan setelah Sumpah Pemuda. Sekitar 1000 perempuan dan laki-laki menghadiri acara pembukaan kongres ini.<sup>10</sup> Banyak hal penting yang dibicarakan di Kongres Perempuan Pertama ini yang ternyata isunya juga masih relevan hingga saat ini. Oleh karenanya, kongres ini menurut Soesman 'layak diakui sebagai titik awal gerakan perempuan yang sangat berarti'.<sup>11</sup>

Namun, berkuasanya Orde Baru membuat gerakan perempuan menjadi senyap. Dharma Wanita yang bentukan Orde Baru membuat perempuan hanya berkulat di pekerjaan-pekerjaan domestik saja. Suryakusuma menyebut gerakan perempuan yang berada di bawah bimbingan Dharma Wanita itu dengan sebutan *State Ibuism*; ideologi negara yang dijiwai dan dibentuk oleh negara di setiap proyek-proyek yang berhubungan dengan perempuan<sup>12</sup>. Dharma Wanita didirikan pada

---

<sup>10</sup>Atashendartini Koesoemoe Oetoyo-Habsjah dalam Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV, 2007), hlm. xi.

<sup>11</sup>Monique Soesman dalam Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama...*, hlm. viii.

<sup>12</sup>Julia I. Suryakusuma, *Sex, Power and Nation; an Anthology of Writing 1979-2003*, (Metaphor Publishing, 2004), hlm. 161.

tanggal 5 Agustus 1974 yang dari awal pembentukannya memang dimaksudkan untuk mendukung kerja-kerja Orde Baru. Sejarawan UI, Ong Hok Ham menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini merupakan pelaksanaan dari kebijakan moral publik yang dikeluarkan oleh Ratu Alexandria Victoria (1837-1900). Hidup bersama satu suami dan anak-anak merupakan model keluarga ideal. Nilai ini kemudian menyebar ke Eropa di abad 19 dan karena Indonesia pernah di jajah Belanda, nilai ini juga menyebar ke Indonesia. Ketika Ibu Tien Suharto duduk sebagai Pembina Dharma Wanita, nilai-nilai keraton (di mana ibu Tien dibesarkan) diterapkan juga sebagai nilai-nilai Dharma Wanita di mana nilai-nilai keraton tadi sangat mirip dengan nilai-nilai Belanda. Praktis, ketika Orde Baru berkuasa sedikit sekali gerakan perempuan yang bisa berbicara tentang pembangunan kapasitas di luar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Dharma Wanita.

Kata 'Wanita' sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 'yang diinginkan dan ditaklukkan'<sup>13</sup> sehingga pemahaman dari kata ini adalah perempuan sebagai makhluk yang pasif. Kata 'wanita' ini yang kemudian dipergunakan oleh Orde Baru dalam segala hal yang berkaitan dengan kebijakan tentang perempuan. Dharma Wanita mengusung ide Orde Baru yang menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu yang harus mengikuti 'kodrat' yang dipahami oleh mayoritas masyarakat.

Sedangkan kata 'empu' berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya 'seseorang yang terhormat dan dinamis'. Arti kata ini kebalikan dari kata 'wanita' yang bermakna pasif, 'empu' bermakna aktif. Penggunaan kata 'perempuan' merupakan simbol dari gerakan perempuan Indonesia dalam menentang pemerintahan yang otoriter.

---

<sup>13</sup>Galenter dalam Yanti Muchtar, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta: Institut Kapal Perempuan, 2016), hlm. 62.

Kebangkitan perempuan Indonesia kembali setelah rezim Orde Baru runtuh. Ini dimulai ketika beberapa ibu-ibu, aktivis perempuan dan akademisi perempuan berdemonstrasi di bundaran HI meminta agar harga susu tidak naik, yang akan berakibat anak-anak kurang gizi. Gerakan ini dikenal dengan nama Gerakan Suara Ibu Peduli (SIP). Gerakan kedua adalah ketika diadakannya kongres perempuan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998 yang dihadiri oleh 500 peserta yang merupakan perwakilan perempuan dari seluruh Indonesia. Sejak itu mulai banyak organisasi perempuan yang tumbuh di Indonesia. Menurut Muchtar, jika ditahun 80an hanya ada 21 lembaga perempuan, maka di tahun 90an terdapat 52 lembaga perempuan.<sup>14</sup>

### **C. Keberadaan Perempuan Aceh *Award***

Gerakan perempuan ini tidak hanya ada di pulau Jawa, tapi juga merambah ke seluruh Indonesia, salah satunya adalah Aceh. Dimulai dengan berdirinya satu organisasi perempuan di tahun 1989, maka mulailah muncul beberapa lembaga perempuan setelah tsunami 2004. Salah satu kegiatan yang kemudian menarik banyak pihak adalah diadakannya Perempuan Aceh *Award* di tahun 2008. Agar kerja-kerja perempuan dikenal dan dihargai, maka perlu ada usaha untuk mengangkat kerja-kerja mereka ini sehingga masyarakat tau bahwa banyak perempuan yang telah berbuat untuk negaranya. Ide membuat kegiatan Perempuan Aceh *Award* ini diinisiasi oleh beberapa perempuan Aceh.

Ide ini datang ketika pemerintah Aceh memberikan penghargaan pada perempuan-perempuan yang terlibat dalam usaha membangun perdamaian di Aceh. Namun, kriteria siapa yang menerima penghargaan tersebut tidak jelas. Satu yang ditangkap oleh para aktivis perempuan

---

<sup>14</sup>Yanti Muchtar, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia...*, hlm. 76.



Aceh bahwa penerima penghargaan tersebut bukan dari komunitas akar rumput. Para penerima penghargaan tersebut adalah mereka yang mempunyai akses pada ekonomi dan kekuasaan sehingga penghargaan tersebut bukan hal yang istimewa. Para aktivis perempuan Aceh lalu mencoba membuat kegiatan satire, memberikan penghargaan bukan untuk para aktivis perempuan, melainkan pada perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan bawah yang tidak mempunyai finansial berlebih dan kekuasaan, tapi masih tetap konsisten untuk bekerja membantu sesama.

Kegiatan yang bernuansa memberikan apresiasi bagi perempuan Aceh pertama sekali diadakan di salah satu *caffee* di Banda Aceh pada tanggal 8 Maret 2009.<sup>15</sup> Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan hari Perempuan Internasional. Saat itu kegiatan ini belum bernama Perempuan Aceh *Award*, lebih dikenal sebagai kegiatan Hari Perempuan Internasional. Kegiatan pemberian penghargaan yang berbentuk sertifikat ini dibagi dalam beberapa kategori seperti kategori pendidikan dan kesehatan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didapat dari hasil patungan para aktivis perempuan sehingga terkumpul dana sebanyak Rp. 500.000 untuk kegiatan tersebut. Para pemenang saat itu hanya mendapatkan sertifikat, yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan kerja-kerja luar biasa, untuk membangun dan melakukan pemenuhan hak perempuan korban. Selain itu juga mereka telah mencoba melakukan upaya meningkatkan posisi tawar perempuan.

Ketika acara pertama ini sukses, mulai muncul ide untuk menseriusi kegiatan ini dikalangan gerakan perempuan Aceh. Beberapa aktivis perempuan dan aktivis laki-laki yang *concern* pada gerakan perempuan mulai membuat konsep acara Perempuan Aceh *Award* ini.

---

<sup>15</sup>Wawancara pada tanggal 3 Maret 2017.

Nama-nama yang masuk kedalam tim perumus adalah Nurdin Jordas, Samsidar, Khairani Arifin, Surayya Kamaruzzaman, Azriana Manalu dan Nursiti. Pembentukan tim perumus ini merupakan hasil dari refleksi Gerakan Perempuan yang diadakan di Hotel Mekkah, Banda Aceh.<sup>16</sup>

Para tim perumus inilah yang kemudian mengawal penyusunan konsepnya, sehingga dilaksanakan Perempuan Aceh *Award* perdana yang lebih serius. Kegiatan Perempuan Aceh *Award* pertama ini diseriisi karena pada tahun 2010, terdapat dana dari Oxfam di beberapa lembaga seperti RPUK, ADF, KPI dan MaTa dalam bentuk program di keempat lembaga tersebut bernama *Raising Her Voice*. Salah satu aktivitas yang dirancang dalam program itu adalah pemberian *award* itu. Oleh karena itu, Perempuan Aceh *Award* mulai resmi digunakan pada tahun 2010 dan dikenal sebagai Perempuan Aceh *Award* pertama.

Meski beberapa responden yang diwawancarai mengatakan bahwa penyelenggaraan Perempuan Aceh *Award* pertama masih lemah, namun diakui bahwa kegiatan kedua ini konsepnya terbilang cukup baik. Mekanisme kerja disusun cukup ketat. Misalnya nama juri tidak di publikasikan, kandidat yang ikut harus direkomendasi oleh NGO pendamping, oleh masyarakat atau oleh kelompok. Di sini terlihat jelas bahwa harapan pelaksanaan Perempuan Aceh *Award* ini adalah untuk memilih orang-orang yang sudah bekerja di lapangan, tapi selama ini tidak mendapat perhatian apa-apa.

Pemilihan nama Perempuan Aceh *Award* juga bukan perkara gampang. Setelah mendapatkan beberapa nama seperti Narasyiah *Award*, Cut Nyak Dhien *Award* dan Datu Beru *Award* akhirnya para perumus menyepakati untuk memberi nama Perempuan Aceh *Award* untuk

---

<sup>16</sup>Wawancara pada tanggal 2 Maret 2017.

kegiatan ini karena tidak ada justifikasi yang cukup kuat untuk menggunakan nama-nama *award* yang telah diusulkan tersebut.<sup>17</sup>

Kesan satire yang tujuannya untuk menyindir pemerintah bahwa seharusnya *reward* ini diberikan oleh pemerintah, terasa di Perempuan Aceh *Award* kedua ini. Pihak penyelenggara juga mengundang para pembuat kebijakan untuk datang di acara ini, karena menurut mereka kegiatan ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam kewajibannya dalam pemenuhan hak masyarakat yaitu '*to fulfill, to promote and to protect*'.

Kegiatan Perempuan Aceh *Award* pertama pada tahun 2010 dihadiri oleh pemerintah yaitu Gubernur Irwandi Yusuf dan Ketua DPRA Hasbi Abdullah. Kegiatan ini didanai oleh Oxfam yang mempunyai program *Raising Her Voice*. Perempuan Aceh *Award* kedua pada tahun 2012 didanai oleh pemerintah dan bantuan lembaga internasional. Namun tidak ada pihak pemerintah dari eksekutif yang datang di acara ini, kecuali ketua DPRA Hasbi Abdullah.<sup>18</sup> Di Perempuan Aceh *Award* ketiga, acara ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, melainkan dana aspirasi yang diberikan oleh seorang anggota dewan Provinsi Aceh.

#### **D. Kendala Melaksanakan Perempuan Aceh *Award***

Banyak harapan yang dibangun dengan adanya kegiatan Perempuan Aceh *Award* ini, terutama di kalangan aktivis perempuan. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan Perempuan Aceh *Award* ini tidak selalu dalam keadaan mulus. Banyak rintangan dan kendala yang dihadapi panitia agar kegiatan ini bisa terus berjalan.

---

<sup>17</sup>Wawancara pada tanggal 3 Maret 2017.

<sup>18</sup>Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017.

- Kendala pertama adalah tidak adanya sinergi antara pemerintah dan LSM yang menginisiasi kegiatan Perempuan Aceh Award ini. Salah seorang responden menyampaikan keluhannya:

“secara konsep kita kan mau mendorong pemerintah melakukan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. Salah satunya dengan menganggarkan penghargaan untuk Perempuan Aceh Award dua tahun sekali itu. Ini kan sudah berhasil tapi belum menjadi bagian [kerja pemerintah], jadi masih kayak kita (Gerakan Perempuan) yang punya ide, kita yang melakukan. Seharusnya ini kan sama-sama”.<sup>19</sup>

- Kendala kedua adalah dana. Salah seorang responden mengatakan bahwa:

“semakin hari semakin tidak stabil keuangan gerakan ini. Hal ini berakibat pada tidak adanya dana yang tersedia untuk menggelar kegiatan ini. Ditambah dengan semakin sedikitnya lembaga internasional yang bekerja di Aceh menyebabkan gerakan perempuan susah untuk menggelar event besar ini, karena tidak adanya dukungan dana dari luar. Dalam hal dana, sebenarnya di tahun 2012 ada donasi dari Badan PP. Saat itu ada penandatanganan komitmen untuk mendukung pemberdayaan program perempuan, agar Badan PP bisa menganggarkan kegiatan Perempuan Aceh Award berikutnya. Kegiatan Perempuan Aceh Award tahun 2012 sebagian besar anggaran didukung oleh Logica dan UNwomen. Saat itu dilakukan penandatanganan MoU atas ‘desakan’ UNwomen dan Logica. Penandatanganan MoU itu bermaksud agar ke depan pemerintah ikut andil melaksanakan kegiatan Perempuan Aceh Award ini, sebagai satu bukti tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan warganya. MoU itu ditandatangani di panggung Perempuan Aceh Award. Karena waktu itu gubernur tidak hadir, maka yang menandatangani adalah

---

<sup>19</sup>Wawancara pada tanggal 6 Maret 2017.

ketua BP3A Aceh Dahlia M.Ag dan ketua DPRA, Hasbi Abdullah. Namun ternyata, komitmen ini juga tidak berjalan, karena pada penyelenggaraan Perempuan Aceh Award ketiga, kegiatan ini malah didukung dari dana aspirasi salah seorang anggota dewan Provinsi Aceh”.

- Kendala ketiga adalah keengganan pemerintah menjalankan program ini sebagai program mereka. Ini terlihat dari tidak berjalannya komitmen yang telah ditandatangani pada tahun 2012. Ketika kegiatan ini sudah berusaha dianggarkan di BP3A Aceh, namun kemudian dicoret ketika akan dinaikkan ke BAPPEDA Aceh, sehingga pemerintah, lewat BP3A Aceh, sama sekali tidak terlibat aktif di kegiatan Perempuan Aceh Award. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang panitia penyelenggara:

“yang kita bayangkan publikasi Perempuan Aceh Award ini bisa kita lakukan di radio-radio. Radio apa yang tidak dimiliki oleh pemerintah?? Papan pengumuman, baliho apa yang mereka [pemerintah] tidak punya?? Seharusnya mereka mempromosikan seperti itu secara terencana. Harusnya pemerintah bisa merekomendasikan juga siapa perempuan di komunitas yang selama ini [pemerintah] tau sudah mengabdikan untuk kerja-kerja kemanusiaan, di kampungnya masing-masing, di daerahnya di pelosok, yang bisa direkomendasikan”.

- Kendala keempat adalah koordinasi internal antara anggota Gerakan Perempuan Aceh. Karena tidak adanya jadwal yang pasti untuk kegiatan ini, proses kegiatan ini dilaksanakan sangat terburu-buru. Ketika sebuah lembaga mulai mensounding kapan Perempuan Aceh Award dilaksanakan, mulailah dicari siapa kandidat-kandidat untuk kegiatan tersebut. Sering sekali, sedikit perempuan-perempuan yang didampingi lembaga-lembaga perempuan yang menjadi nominator. Walaupun ada perempuan-perempuan kandidat yang merupakan

dampingan lembaga perempuan yang lolos di seleksi pertama cenderung tidak masuk pada penilaian tahap lanjut. Hal ini tergambar dari pernyataan salah seorang responden:

“bukti konkrit teman-teman LSM melakukan pendampingan sehingga adanya perempuan-perempuan hebat tersebut. Tapi selama ini perempuan-perempuan hebat tersebut bukan lahir dari hasil pendampingan teman-teman LSM itu. Ummi Hanisah, dia tumbuh sendiri. Reje, dia tumbuh sendiri”.<sup>20</sup>

Baru pada pelaksanaan Perempuan Aceh Award ketiga, harapan bahwa yang menang berasal dari kelompok dampingan, berhasil diwujudkan. Namun ide awal dari konten dari Perempuan Aceh Award ini masih kurang dipahami oleh lembaga-lembaga dan LSM-LSM perempuan bahwa target Perempuan Aceh Award adalah menghasilkan perempuan potensial dari komunitas mereka yang kemudian didampingi. Karena kekurangan koordinasi dan kurangnya pemahaman akan kegiatan ini (di samping karena kerja-kerja lembaga masing-masing yang juga butuh perhatian) menyebabkan kegiatan Perempuan Aceh Award ini seakan tidak diseriusi. Kesan ini semakin terbaca ketika melihat pelaksanaan Perempuan Aceh Award pertama dan kedua yang dilaksanakan di Sultan Selim II, yang mempunyai ruangan yang sangat megah dan besar, namun ketika Perempuan Aceh Award ketiga, kegiatan ini dilaksanakan di BKOW yang fasilitasnya sangat minim.

- Kendala kelima adalah proses seleksi. Dalam menyeleksi kandidat yang ikut untuk kegiatan ini, panitia pelaksana bekerja sama dengan lembaga-lembaga perempuan yang ada di Banda Aceh yang mempunyai daerah dampingan hingga ke seluruh Aceh. Selain itu

---

<sup>20</sup>Wawancara pada tanggal 2 Maret 2017.

panitia pelaksana, pada tahun 2015, menggandeng pemerintah lewat BP3A Aceh untuk bisa merekomendasikan orang-orang yang dianggap pantas ikut di kegiatan ini berdasarkan kacamata BP3A yang ada di seluruh kabupaten/kota Aceh. Namun, panitia berharap para kandidat mempunyai dokumentasi tertulis tentang hal-hal yang sukses yang telah mereka lakukan. Tapi para kandidat ini tidak cukup mampu untuk menuliskannya. Ketika mereka diminta untuk mengirim CV atau profil, yang tertulis hanya sebatas biodata biasa. Kisah-kisah inspiratif yang telah mereka lakukan tidak muncul di CV maupun di biodata mereka. Akibatnya pihak penyelenggara menghubungi LSM pendamping yang mengirimkan CV dan biodata kandidat untuk bisa menuliskan kisah sukses yang telah dilakukan oleh kandidat. Namun, kemampuan menulis lembaga juga terbatas. Akibatnya banyak dari para kandidat ini yang tidak tergalai kisah sukses yang telah mereka lakukan.

Selain itu, banyak dari LSM yang baru memberikan nama-nama kandidat yang direkomendasi oleh pihak panitia di akhir-akhir pendaftaran. Namun inipun terkendala karena banyak yang menyatakan komitmen mengirim kandidat, tapi belum dikirim sehingga terpaksa masa pendaftaran diperpanjang. Dan ini berakibat pada tertundanya pelaksana acara dari tanggal yang ditetapkan.

Hal lain lagi yang berkenaan dengan internal pelaksana adalah kegiatan yang bersifat dadakan. Acara Perempuan Aceh *Award* ini belum mempunyai jadwal tetap, misalnya tahunan atau dua tahunan. Ini disebabkan karena belum tersistemnya kerja ini, sehingga hanya berdasarkan pada kerelawanan lembaga-lembaga yang punya kemauan untuk melaksanakan kegiatan ini. Pelaksanaan Perempuan Aceh *Award* terakhir dilaksanakan pada tahun 2015,

namun ketika tulisan ini dibuat (2018) belum ada tanda-tanda kegiatan ini akan dilaksanakan kembali.

#### **E. Penutup**

Gerakan perempuan Aceh mempunyai andil yang sangat besar untuk membangkitkan semangat dan kegiatan perempuan-perempuan di Aceh. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan hingga 2015 adalah pemberian penghargaan bagi perempuan-perempuan potensial yang berasal dari akar rumput. Namun, seiring dengan semakin sedikitnya dana dan pekerja yang bersedia menyediakan waktunya untuk mengurus kegiatan ini, menyebabkan kegiatan ini mati perlahan-lahan. Meski masih banyak suara yang menginginkan acara ini dilaksanakan lagi, namun masih butuh -bukan saja semangat- bantuan dalam hal-hal lainnya agar kegiatan ini bisa terlaksana kembali.

Perempuan Aceh *Award* telah memberi semangat dan rasa dihargai bagi perempuan-perempuan yang telah mendapatkan penghargaan tersebut. Meski di pelaksanaan pertama dan kedua, dianggap bahwa semangat awal Perempuan Aceh *Award* telah melenceng, namun di Perempuan Aceh *Award* ketiga dianggap telah mengembalikan semangat Perempuan Aceh *Award* karena telah diberikan pada seorang perempuan yang memang berjuang dari nol dan tanpa dibantu oleh fasilitas apapun.

Aceh memang membutuhkan perempuan-perempuan seperti ini, dan lewat penghargaan yang mereka dapatkan semakin membangkitkan rasa percaya diri mereka. Dan kepercayaan diri itu telah membuat mereka mengepakkan sayap mereka hingga dikenal, tidak saja oleh lingkungan di sekitar mereka, namun oleh nasional bahkan internasional. Misalnya, pemenang Perempuan Aceh *Award* pertama, Ummi Hanisah, mendapatkan bantuan dari satu lembaga Jepang untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan sosialnya. Pemenang Perempuan Aceh *Award* kedua,



Asnaini, mendapat penghargaan Saparinah Sadli *Award*. Pemenang Perempuan Aceh *Award* ketiga, Badriah, mengikuti kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Jakarta dan menjadi pembicara. Dari keberhasilan-keberhasilan ini terlihat bahwa Perempuan Aceh *Award* telah menghadirkan banyak perempuan potensial yang bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di lingkungan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Anthony Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, Singapore University Press, 2006.
- Julia I. Suryakusuma, *Sex, Power and Nation; an Anthology of Writing 1979-2003*, Metaphor Publishing, 2004.
- Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Rosnida Sari, *Women's Participation in Local Politics in Aceh (A Case Study)*, Unpublished Thesis, South Australia: Flinders University, 2013.
- Saiful Mahdi, *Perempuan dari Sebuah Negeri Bernama Aceh*, dalam *Perempuan dan Proses Perdamaian di Aceh*, Banda Aceh: Aceh Institute, 2009.
- Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV, 2007.
- Yanti Muchtar, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Institut Kapal Perempuan, 2016.